

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Probolinggo

a. Geografis

Menurut data dari Dinas Pertanian, luas wilayah Kota Probolinggo tercatat 5.666,70 Ha, pada tahun 2012 terdiri dari Lahan Sawah sebesar 1.832,00 Ha (32,33%), Lahan Bukan Sawah untuk pertanian 928,33 Ha (16,38%) dan Lahan Bukan Pertanian 2.906,72 Ha (51,29%).

Wilayah Kota Probolinggo dialiri oleh 6 (enam) sungai, yaitu Sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah dan Pancur. Dengan rata-rata panjang aliran 3,80 Km, yang terpanjang adalah Sungai Legundi dengan panjang aliran 5,439 Km dan yang terpendek adalah Sungai Kasbah dengan panjang aliran hanya 2,037 Km (tabel 1.3). Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang tahun, mengalir dari arah selatan ke utara sesuai dengan kelerengan wilayah (<http://bappeda.jatimprov.go.id>).

b. Kependudukan

Probolinggo akhir tahun 2012 hasil registrasi penduduk, menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tercatat sebesar 219.139 jiwa. Persentase terbesar di Kecamatan Mayangan sebesar 27,6 persen, disusul Kanigaran 25,5 persen, Kademangan sebesar 17,8 persen, Wonoasih sebesar 14,8 persen dan Kedopok sebesar 14,3 persen (tabel 3.1.2). Bila dilihat dari status kewarganegaraan, hanya 0,017 persen atau sebesar 38

jiwa yang berkewarganegaraan asing (WNA) dari total penduduk Kota Probolinggo.

Sex ratio pada akhir tahun 2012 sebesar 98,62, angka ini berarti dari 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Apabila ditinjau per kecamatan maka *sex ratio* Kecamatan Kademangan, Kedopok, Wonoasih, Mayangan dan Kanigaran sebesar 98,4; 99,5; 99,4; 97,8 dan 98,7.

Jumlah kelahiran yang tercatat pada tahun 2012 sebesar 2.756 jiwa, jumlah kematian sebesar 1.752 jiwa dan penduduk migrasi yang masuk 5.619 orang, sedangkan yang keluar 5.545 orang. (Dispenduk Kota Probolinggo)

c. UMK Kota Probolinggo

Upah Minimum Kota Probolinggo dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2019-2023 masing-masing tahun 2019 sebesar Rp. 2.173.864, tahun 2020 sebesar Rp. 2.355.662, tahun 2021 sebesar Rp. 2.350.000, tahun 2022 sebesar Rp 2.553.265 dan tahun 2023 sebesar Rp. 2.753.265. (<https://radarbromo.jawapos.com>)

2. Gambaran Umum DKUPP Kota Probolinggo

a. Profil Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo

1) Sumber Daya Manusia

Urusan Koperasi dan UKM, Terdapat 25 orang PNS yang menangani urusan koperasi dan UKM dari 168 pegawai, 12 orang di

Jabatan struktural dan fungsional umum serta 10 orang staf, Jabatan fungsional tertentu, yakni 2 orang Pranata Komputer dan 1 orang Arsiparis terdapat 19 tenaga PTT dan 1 tenaga kontrak.

Urusan Perdagangan, terdapat Urusan Perdagangan, terdapat 37 orang PNS yang menangani urusan Perdagangan dari 168 pegawai, 5 orang pejabat struktural dan fungsional umum 32 orang staf, jabatan fungsional 1 orang yakni penuluh Industri dan Perdagangan, 65 Tenaga PTT serta 10 Orang Tenaga Kontrak.

Urusan Perindustrian, Terdapat 10 orang PNS yang menangani urusan Perindustrian dari 168 pegawai dinas koperasi, usaha mikro Perdagangan dan Perindustrian, 4 orang di Jabatan struktural 3 orang jabatan fungsional umum dan 3 Jabatan Fungsional Tertentu yakni penyuluh perindagangan serta 3 orang Tenaga PTT.

2) Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- c. Bidang Koperasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- d. Bidang Usaha Kecil dan Mikro, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

- e. Bidang Perdagangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
 - f. UPTD.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

b. Visi dan Misi DKUPP Kota Probolinggo

VISI :

“Membangun Bersama Rakyat untuk Kota Probolinggo yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman dan Berkelanjutan”.

MISI :

Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Potensial.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi DKUPP Kota Probolinggo

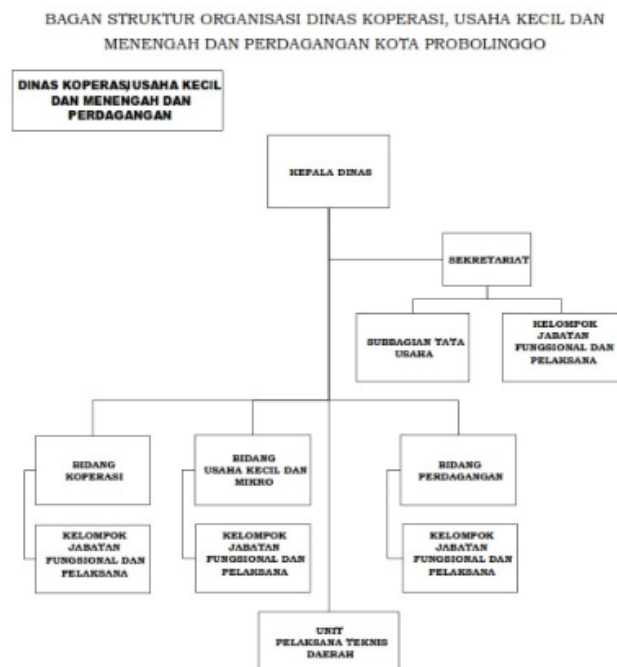
- 1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, serta penyusunan program dan keuangan.

- 2) Bidang Koperasi mempunyai tugas di bidang pelayanan izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
- 3) Bidang Usaha Kecil dan Mikro mempunyai tugas di bidang pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dan pengembangan UMKM.
- 4) Bidang Perdagangan mempunyai tugas di bidang perizinan dan pendaftaran perusahaan, peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, pengelolaan energi baru terbarukan.
- 5) Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang, dan Subbagian Tata Usaha selain melaksanakan tugas dan fungsinya juga melaksanakan tugas manajerial meliputi, perencanaan, perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas, pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- 6) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 7) Pejabat Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.

d. Struktur Organisasi DKUPP Kota Probolinggo

Struktur Organisasi DKUPP Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:



3. Gambaran Umum Pasar Baru

a. Profil Pasar Baru

Pasar Baru dibangun tahun 1933 dan Pemeliharaan/ Revitalisasi tahun 2021, berlokasi di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Kebonsari Kulon, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo. Luas Lahan : 5135 m². Jam operasional yaitu 03.00 WIB s/d 16.00 WIB. Kios berjumlah 42 unit, dan Los sebanyak 776 unit. Pasar Baru menjual kebutuhan pokok, sembako, alat rumah tangga, buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, daging, jajan, warung makanan dan minuman dll.

Area Pasar :

- Sebelah Utara : Jl. Jendral Sudirman
- Sebelah Selatan : Jl. Pahlawan
- Sebelah Timur : Jl. Siamaan
- Sebelah Barat : Jl. Niaga/Cut Nyak Din

Di Pasar Bayu, penjual / pedagang dan pembeli bisa saling tawar menawar untuk mendapat kesepakatan harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pedagang biasa juga memberikan diskon / promo atau potongan harga pada pelanggannya. Pasar ini juga telah di modern kan oleh pemerintah setempat agar nyaman untuk berbelanja dan jual beli.

Pasar Baru adalah salah satu pasar di Kota Probolinggo yang terletak di Kecamatan Kanigaran. Kondisi pasar ini sangat ramai pada setiap harinya. Pasar Baru terlayani oleh jaringan jalan dengan status jalan nasional dan fungsi jalan sebagai jalan arteri sekunder. Tata guna lahan di sekitar Kawasan Baru meliputi pertokoan, perdagangan dan jasa. Untuk ruas jalan di Pasar Baru terdapat pejalan kaki yang melakukan penyebrangan secara sembarangan, parkir pada badan jalan, pedagang kaki lima yang berjualan pada bahu jalan dan trotoar, yang terakhir pada ruas jalan ini terjadi kegiatan bongkar muat barang sehingga berpotensi menjadi hambatan samping tinggi. Kondisi pasar cukup padat akibat pengunjung pasar yang parkir di badan jalan dan tingginya volume pejalan kaki yang berjalan di badan jalan sehingga mempengaruhi kelancaran lalu lintas. Selain itu tingginya konflik antara kendaraan yang

melintas dengan manuver kendaraan yang parkir di badan jalan menyebabkan turunnya kecepatan perjalanan dan antrian kendaraan. Kondisi seperti ini terjadi karena kurangnya pengaturan pengelolaan fasilitas prasarana dan sarana transportasi.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Pandangan Masyarakat Mengenai Pengelolaan Pasar Tradisional

Berbagai macam tanggapan dari elemen-elemen masyarakat turut serta mempengaruhi kebijakan dari relokasi pasar Baru, dan yang juga tidak ketinggalan adalah pengaruh dari konsumen atau pembeli. Keberadaan pasar ini awalnya diterima oleh masyarakat dan terbukti dari besarnya jumlah pekerjaan masyarakat di kelurahan ini yang menjadi pedagang. Tetapi seiring terus bertambahnya jumlah pedagang masyarakat yang lain yang tidak bekerja sebagai pedagang mulai resah karena keberadaan pasar ini. Mereka mulai tidak nyaman dengan banyaknya sampah yang tertinggal dipinggir-pinggir jalan, lain lagi dengan bau yang ditimbulkan dari sisa-sisa jualan yang tidak laku dan dibiarkan membusuk. Masyarakat sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah ini terbukti dari hasil wawancara dengan masyarakat, mereka mengatakan:

“Yang dilakukan pemerintah itu sudah tepat menurut saya, karena ini pasar Baru ini menyebabkan banyak masalah sehingga perlu dilakukan relokasi”.

Kemudian beliau melanjutkan perkataannya:

“Lagi pula pemerintah itu sudah memberi tempat bagi para pedagang. Kalau masih ada juga diantara mereka yang masih berjualan dilokasi ini banyak masalah yang terjadi seperti timbulnya kemacetan apalagi jika ada hujan yang mengakibatkan banjir, sudah pasti terhambat aktifitas jalanan karena tempat pembuangan air tertutup dengan lapak para pedagang”.

Kebijakan ini ditanggapi oleh setiap pedagang, dan kebanyakan pedagang yang memilih bertahan. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan seseorang pedagang yang memilih tetap berjualan dilokasi Pasar

Baru yaitu ibu B umur 42 tahun yang saya temui ketika beliau hendak membereskan barang jualannya.

“Iya memang aku tau pasar ini telah lama direncanakan dipindahkan, memang kalau dilihat cocoknya dipindahkan. Cocoklah, pasar ini udah gak layak lagi ada ditengah kota, apalagi memang kami dipinggir jalan kayak gini. Yah gimanalah dek, uda lama aku jualan disini, pelanggan udah banyak dan taunya disini aku jualan, kalau pindah nanti belum tentu orang itu tau tempatku yang baru, lagian pelangganku orang-orang disekitar sini juga, gak mungkin orang itu datang nyari-nyari tempat saya yang baru nanti.”

Dari wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pedagang yang memilih tetap berjualan di pasar Baru takut kehilangan pelanggan apabila pindah dari lokasi pasar Baru tersebut. Sebenarnya mereka menyadari bahwa keberadaan pasar Baru tersebut tidak layak, namun mereka menyadari keuntungan dan keberadaan mereka yang sudah lama berjualan di daerah tersebut seolah-olah menjadi alasan untuk bertahan dan menghiraukan pemerintah dalam merelokasi pasar Baru itu.

Selain itu ada juga tanggapan masyarakat lain yang setuju dan tidak setuju, sebagian masyarakat ada juga yang menolak dengan kebijakan relokasi ini, mereka menanggapi kebijakan ini terlalu terburu-buru dan tidaklah solusi yang tepat untuk para pedagang dan masyarakat yang tidak setuju seperti wawancara pada Ibu S yang memilih pindah ke Pasar Induk:

“Karena kami sudah diberikan himbauan dari pemerintah untuk tidak lagi berjualan disana jadi kami ikut peraturan ajalah, kami gak mau melawan peraturan. Yah kalau lapak memang yang dijanjikan pemerintah kayaknya kurang puas karena kios-kios disini cenderung sempit dan kecil jadi kurang leluasa menyusun barang, tetapi ada juga enaknyanya disini karena kalau disini gak kena panas, hujan terus kan gedungnya ini agak tinggi jadi gak banjir kalau hujan. Tapi kalau soal pendapatan dek kayaknya gak nentu yah, waktu ada ya ada tapi seringan sepi dek, enakan kayaknya jualan diwaktu tempat yang lama

itulah. Rugilah aku dek kalau aku tinggalkan kiosku ini udah kubayar mahal, lagian belum tentu tempatku itu dulu masih ada”.

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa para pedagang yang berada di tempat yang baru merasa kurang puas dengan kios-kios yang disediakan. Jadi para pedagang menganggap kurang seimbang antara harga kios dan fasilitas yang didapatkan di tempat baru tersebut. Sebenarnya para pedagang yang pindah ingin kembali lagi ke tempat yang lama akan tetapi mereka enggan meninggalkan pasar Baru karena telah mengeluarkan dana yang lumayan besar untuk menyewa kios yang ada disana. Para pedagang menilai pengusuran dengan alasan relokasi ini bukan solusi tepat. Pedagang Baru menilai relokasi ini tidak cocok dan kurang menguntungkan.

“Kami bukan tidak taat akan hukum, tetapi kalau kami dipindahkan, pedagang eceran ini tidak akan bertahan dan kalah bersaing”.

Para pedagang dapat bersatu karena mereka menganggap diri mereka senasib jadi tidak ada salahnya mereka bersatu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti yang diutarakan informan berikut:

“Waktu udah ada kabar mau digusur, kami semua pedagang ngumpullah bicara bagaimana nasib kami, terus sepakat kami kalau kami memang harus berjualan disini, tidak mau kami digusur, yasudah beranilah kami sama-sama melawan waktu datang Satpol PP itu, kami hadang orang itu, bakar-bakaran ban kami ditengah jalan itu. Itu wujud kecewa kami terhadap pemerintah ini yang tidak mau mendengar aspirasi kami”.

Pedagang mengatakan bahwa alasan mereka bertahan adalah

“karena harga sewa lapak dipasar induk mahal sehingga tidak sanggup untuk menyewa lapak maka mereka tetap bertahan dan enggan

meninggalkan pasar Baru karena pasar Baru itu ramai pembeli, sedangkan sisanya menyatakan mereka tidak mau pindah ke pasar induk karena jaraknya cukup jauh.

Disamping itu harga lapak juga menjadi masalah bagi para pedagang, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ratnawati Br. Sembiring:

“Ya harga lapak yang kami sanggup bayar dibawah Rp. 3.000.000 asalkan fasilitas bagus dan pembeli ramai dan sisanya diatas harga tersebut.”

Artinya adalah alasan pedagang menolak pindah bukanlah dari hati mereka, melainkan ada sebuah tekanan karena mereka tidak sanggup untuk membayar harga yang ditetapkan pengelola sehingga mereka berani melawan pemerintah. Ini berarti pedagang memang sudah tidak betah untuk berdagang dipasar Baru, karena terbukti dari hasil survey ini mayoritas mengatakan tempat yang tepat untuk berjualan adalah tempat yang lama. Seperti pernyataan dari Ibu S:

“Menurutku kalau tidak perlu ada relokasi, di tempat ini sudah cukup”.

Rencana pemerintah yang akan terus membersihkan lokasi pasar dari pedagang menimbulkan reaksi dari pedagang, saat penulis menanyakan melalui wawancara kepada Bapak Y:

“Jika pasar kembali dijaga aparat dan direlokasi maka kami akan pindah ketempat lain yang tidak dijaga oleh aparat, dalam arti pedagang pindah lapak dari tempat biasa dan bisa juga pindah kelokasi pasar lain. dan meminta hak kami untuk berdagang direlokasi pasar melalui demonstrasi”.

Ada pedagang yang bertahan maka ada juga pedagang yang mengikuti arahan pemerintah untuk pindah, namun hanya dalam jumlah yang kecil,

pedagang yang pindahan juga tidak mendapat apa yang seharusnya mereka dapat di pasar baru seperti janji pemerintah, ada juga tuntutan mereka terhadap pemerintah. Seperti wawancara terhadap Bapak Yusuf, beliau memilih pindah ke tempat yang baru dengan alasan mengikuti aturan pemerintah.

2. Proses Relokasi

a. Sebelum Relokasi

Dalam kasus relokasi Pasar Baru, proses perumusan kebijakan relokasi dan modernisasi Pasar Baru telah membuat dan menghasilkan keputusan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo setuju untuk dilakukan relokasi Pasar Baru. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Dinas:

“Kebijakan relokasi ini berawal karena banyaknya permasalahan yang timbul di Pasar Baru seperti kemacetan, banjir, sampah berserakan dll. Sehingga menjadi pertimbangan untuk dilakukan relokasi.”

Dalam hal relokasi Pasar Baru Kota Probolinggo, pemerintah daerah melakukan relokasi dikarenakan menurut Pemerintah Kota Probolinggo kondisi Pasar Baru yang lama sudah tidak lagi memenuhi standar layak pasar.

“Awalnya, rencana relokasi ini mendapat penolakan dan mereka merasa akan dirugikan, meskipun awalnya ditolak namun tetap berjalan karena resistensi pedagang diminimalisir oleh pengarahannya dari Pemkot Probolinggo.”

Dari penyajian data yang telah disampaikan di atas, dapat kita pahami bahwa dalam proses sebelum relokasi adalah tahap perumusan kebijakan yang didalamnya perumusan tidak hanya melibatkan peran

Pemerintah Kota Probolinggo tetapi juga para pedagang Pasar Baru, walaupun peran Pemkot Probolinggo sangat dominan dan peran pedagang hanya sebatas diberi pengarahan atau sosialisasi untuk meredam resistensi terhadap kebijakan relokasi pasar dikarenakan hal ini tidak lepas dari kedudukan Pasar Baru yang memang dimiliki oleh Pemkot Probolinggo.

b. Ketika Relokasi

Implementasinya relokasi mencakup berbagai bidang termasuk tata ruang, dinamika sosial ekonomi maupun proses adaptasi pada hal baru. Maka diperlukan pemahaman mendalam dari konsep relokasi tidak hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga masyarakat terutama stakeholder pasar.

“Kita lakukan sosialisasi dan pengarahan kepada semua pedagang sebelumnya, karena banyaknya penolakan dengan kebijakan ini.”

Penolakan dan resistansi terhadap perubahan merupakan hal umum yang sering terjadi di dalam masyarakat. Permasalahan umum dalam implementasi kebijakan adalah tidak efektifnya implementasi karena penolakan-penolakan terhadap kebijakan termasuk dalam kasus relokasi Pasar Baru.

“kita lakukan pendekatan kepada pedagang pasar agar pedagang-pedagang tersebut merasa diikutsertakan sehingga ada feedback dalam proses relokasi ini.”

Dalam kasus relokasi Pasar Baru sebaiknya Pemerintah Kota Probolinggo perlu meningkatkan partisipasi pedagang Pasar Baru dalam kebijakan relokasi Pasar Baru sehingga feedback dari pedagang Pasar

Baru dapat menjadi pertimbangan dalam merelokasi pasar. Sehingga stakeholder dalam kebijakan relokasi Pasar Baru dapat sepakat dan meminimalisir resistensi terhadap kebijakan.

c. Setelah Relokasi

Tahap sesudah relokasi adalah tahap dimana kebijakan telah diimplementasikan dan melihat perkembangan setelah implementasi telah terlaksana. Dari penyajian data yang telah disampaikan sebelumnya para pedagang dan staf UPT Pasar Baru hanya perlu bersiap-siap karena pembangunan Pasar Baru telah mencapai tahap finishing.

Implikasi-implikasi yang terjadi dapat menentukan bagaimana kebijakan selanjutnya dapat diformulasikan. Hal ini juga berlaku saat nantinya Pasar Baru telah dapat ditempati, hendaknya pemerintah Kota Probolinggo dapat memperhatikan aspirasi-aspirasi stakeholder Pasar Merjosari dalam merelokasi kembali aktivitas pasar ke Pasar Baru sehingga kebijakan relokasi dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik.

3. Dampak Sosial dan Ekonomi Relokasi Pasar

a. Dampak Sosial

Dampak kebijakan adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan dan dampak kebijakan dapat menimbulkan efek segera (present) maupun efek jangka panjang. Dampak sosial adalah konsekuensi sosial terhadap adanya suatu

kegiatan pembangunan maupun suatu penerapan kebijakan atau program dan merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan aktifitas pembangunan.

Dalam penelitian ini dampak sosial yang terjadi di Pasar Baru dialami oleh pedagang, pekerja dan masyarakat sekitar. Terkait dengan dampak sosial yang menunjukkan perubahan langganan yaitu bergantinya pembeli tetap (langganan) yang biasa membeli di satu pedagang tetapi setelah relokasi, menjadi pembeli langganan ke pedagang lain. Seperti yang dijelaskan Ibu R sebagai berikut:

“saya ya aslinya gak setuju mas, soalnya di tempat lama kita sudah ada langganan, kalau pindah gini kan jadinya pelanggan gak tau tempat saya, akhirny belinya di tempat lain.”

Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan data yang menyatakan tidak ada perubahan pembeli yang signifikan atau memiliki pengaruh besar bagi pedagang setelah pasar direlokasi. Walaupun ada beberapa pedagang yang merasakan dampak perubahan pelanggan yaitu penurunan pelanggan, dampak ini hanya mengena ke sebagian kecil pedagang yang menurut pandangan peneliti adalah karena faktor tempat atau kios berjualan pedagang-pedagang tersebut terletak di bagian paling belakang Pasar Baru.

Mengenai dampak kemacetan, hasil wawancara dan observasi oleh peneliti :

“tidak terlalu macet mas, karena di empat titik keluar dan masuknya kendaraan di Pasar Baru sudah ada tukang parkir untuk mengatur lalu lintas kendaraan yang keluar dan masuk pasar, tapi ya jalan tetep padat kendaraan, jam pagi hari dan sore karena

(pelajar, pekerja, dan orang umum termasuk pembeli yang menuju Pasar Baru).”

Dampak sosial selanjutnya adalah mengenai pengelolaan sampah. Sampah pasar pada umumnya memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan sekitar pasar. Volume dan jumlah sampah yang ada di tempat pembuangan sampah pada pasar tradisional sangat besar. Dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti, ada beberapa poin penting yang patut diperhatikan dalam pengelolaan masalah sampah pasar tradisional.

“sampah diangkut dua kali dalam sehari untuk selanjutnya dibuang ke pembuangan sampah akhir dan tidak ada tindak lanjut lebih dari pengangkutan sampah tersebut.”

b. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi dalam pembahasan ini meliputi dampak relokasi pasar terhadap pendapatan pedagang dan akses ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar Pasar Baru.

Dari hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

“penurunan pendapatan gak terlalu sih mas, tergantung rame gaknya pembeli. Tapi ya kadang lebih meningkat.”

Relokasi ke Pasar Baru bagi mayoritas pedagang dapat dianggap sebagai dampak ekonomi yang positif. Peningkatan dan penurunan pendapatan yang dialami pedagang di Pasar Baru disebabkan oleh jumlah pembeli. Tata letak pedagang di Pasar Baru memang sedikit berbeda dengan di Pasar Baru dulu sehingga sehingga berpengaruh terhadap akses pembeli kepada pedagang.

Ada juga Pedagang yang mengalami penurunan, seperti yang dikatakan:

“saya dapat kios dan pedagang kaki lima yang dekat area parkir jadi lebih dekat mas, yaa ada peningkatan sih mas dibandingkan di tempat dulu.”

Selanjutnya mengenai akses ekonomi masyarakat, hasil wawancara peneliti menunjukkan:

“proses relokasi ke Pasar Baru telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar Pasar. Banyak warga Kanigaran yang memilih berusaha atau berdagang di Pasar Baru, ada yang bekerja sebagai juru parkir, pedagang kaki lima, maupun pedagang yang menyewa kios atau bedak.”

C. Interpretasi Data

1. Pandangan Masyarakat Mengenai Pengelolaan Pasar Tradisional

Ada berbagai macam pandangan masyarakat mengenai pengelolaan pasar tradisional. Ada Masyarakat sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah dan ada juga yang bentuk penolakan.

Ada pedagang yang memilih tetap berjualan di pasar Baru takut kehilangan pelanggan apabila pindah dari lokasi pasar Baru tersebut. Sebenarnya mereka menyadari bahwa keberadaan pasar Baru tersebut tidak layak, namun mereka menyadari keuntungan dan keberadaan mereka yang sudah lama berjualan di daerah tersebut seolah-olah menjadi alasan untuk bertahan dan menghiraukan pemerintah dalam merelokasi pasar Baru itu. Kebijakan ini dianggap terlalu terburu-buru dan tidaklah solusi yang tepat untuk para pedagang. Para pedagang menganggap kurang seimbang antara harga kios dan fasilitas yang didapatkan di tempat baru

tersebut. Sebenarnya para pedagang yang pindah ingin kembali lagi ke tempat yang lama akan tetapi mereka enggan meninggalkan pasar Baru karena telah mengeluarkan dana yang lumayan besar untuk menyewa kios yang ada disana.

Para pedagang menilai pengrusakan dengan alasan relokasi ini bukan solusi tepat. Pedagang Baru menilai relokasi ini tidak cocok dan kurang menguntungkan. Ada pedagang yang bertahan maka ada juga pedagang yang mengikuti arahan pemerintah untuk pindah.

2. Proses Relokasi

a. Sebelum Relokasi

Dalam teori kebijakan publik, perumusan kebijakan adalah suatu komponen awal dari penerapan atau implementasi. Dalam kasus relokasi Pasar Baru, proses perumusan kebijakan relokasi dan modernisasi Pasar Baru telah membuat dan menghasilkan keputusan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo setuju untuk dilakukan relokasi Pasar Baru.

Ditinjau dari definisi kata relokasi yaitu pemindahan tempat atau memindahkan tempat. Relokasi merupakan salah satu kegiatan dalam kebijakan pemerintah yang mencakup bidang perencanaan tata ruang, peningkatan kesejahteraan ekonomi sosial dll. Sehingga pemerintah, khususnya pemerintah daerah memiliki hak melakukan relokasi pada sektorsektor yang dikuasai pemerintah daerah termasuk fasilitas umum seperti pasar.

Dalam hal relokasi Pasar Baru Kota Probolinggo, pemerintah daerah melakukan relokasi dikarenakan menurut Pemerintah Kota Probolinggo kondisi Pasar Baru yang lama sudah tidak lagi memenuhi standar layak pasar. Pada awalnya, rencana relokasi Pasar Baru ini mendapat penolakan dari sebagian besar pedagang karena para pedagang merasa dengan dipindahkannya Pasar Baru hanya akan merugikan pedagang. Walaupun sebelum relokasi dijalankan telah terjadi penolakan tetapi pada akhirnya relokasi tetap berjalan karena resistensi pedagang diminimalisir oleh pengarahan dari Pemkot Probolinggo bahwa relokasi hanya bersifat sementara sampai Pasar Baru telah selesai direnovasi.

Dari penyajian data yang telah disampaikan di atas, dapat kita pahami bahwa dalam proses sebelum relokasi adalah tahap perumusan kebijakan yang didalamnya perumusan tidak hanya melibatkan peran Pemerintah Kota Probolinggo tetapi juga para pedagang Pasar Baru, walaupun peran Pemkot Probolinggo sangat dominan dan peran pedagang hanya sebatas diberi pengarahan atau sosialisasi untuk meredam resistensi terhadap kebijakan relokasi pasar dikarenakan hal ini tidak lepas dari kedudukan Pasar Baru yang memang dimiliki oleh Pemkot Probolinggo.

b. Ketika Relokasi

Dilihat dari konsep relokasi bahwa definisi paling sederhana adalah memindahkan dari lokasi satu ke lokasi lain. Namun dalam

implementasinya relokasi mencakup berbagai bidang termasuk tata ruang, dinamika sosial ekonomi maupun proses adaptasi pada hal baru. Maka diperlukan pemahaman mendalam dari konsep relokasi tidak hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga masyarakat terutama stakeholder pasar.

Ketika proses relokasi sedang berjalan, resistensi-resistensi pedagang seperti saat sebelum relokasi berlangsung sudah dapat diminimalisir oleh sosialisasi dan pengarahan dari Pemerintah Kota Probolinggo. Penolakan dan resistensi terhadap perubahan merupakan hal umum yang sering terjadi di dalam masyarakat. Permasalahan umum dalam implementasi kebijakan adalah tidak efektifnya implementasi karena penolakan-penolakan terhadap kebijakan termasuk dalam kasus relokasi Pasar Baru.

Dalam tahap dimana relokasi sedang berjalan ini penolakan dari pedagang memang tidak sebesar saat awal sebelum relokasi berjalan. Salah satu hal penting untuk meminimalisir penolakan terhadap kebijakan adalah dengan meningkatkan partisipasi stakeholder selain pemerintah dalam policy making.

Dalam kasus relokasi Pasar Baru sebaiknya Pemerintah Kota Probolinggo perlu meningkatkan partisipasi pedagang Pasar Baru dalam kebijakan relokasi Pasar Baru sehingga feedback dari pedagang Pasar Baru dapat menjadi pertimbangan dalam merelokasi pasar. Sehingga

stakeholder dalam kebijakan relokasi Pasar Baru dapat sepakat dan meminimalisir resistensi terhadap kebijakan.

c. Setelah Relokasi

Tahap sesudah relokasi adalah tahap dimana kebijakan telah diimplementasikan dan melihat perkembangan setelah implementasi telah terlaksana. Dari penyajian data yang telah disampaikan sebelumnya para pedagang dan staf UPT Pasar Baru hanya perlu bersiap-siap karena pembangunan Pasar Baru telah mencapai tahap finishing.

Implikasi-implikasi yang terjadi dapat menentukan bagaimana kebijakan selanjutnya dapat diformulasikan. Hal ini juga berlaku saat nantinya Pasar Baru telah dapat ditempati, hendaknya pemerintah Kota Probolinggo dapat memperhatikan aspirasi-aspirasi stakeholder Pasar Merjosari dalam merelokasi kembali aktivitas pasar ke Pasar Baru sehingga kebijakan relokasi dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik.

3. Dampak Sosial dan Ekonomi Relokasi Pasar

a. Dampak Sosial

Menurut William Dunn (2000, h.89), dampak kebijakan adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan dan dampak kebijakan dapat menimbulkan efek segera (present) maupun efek jangka panjang. Sudharto P. Hadi (1995, h.93) menjelaskan bahwa dampak sosial adalah konsekuensi sosial terhadap

adanya suatu kegiatan pembangunan maupun suatu penerapan kebijakan atau program dan merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan aktifitas pembangunan.

Dalam penelitian ini dampak sosial yang terjadi di Pasar Baru dialami oleh pedagang, pekerja dan masyarakat sekitar. Terkait dengan dampak sosial yang menunjukkan perubahan langganan yaitu bergantinya pembeli tetap (langganan) yang biasa membeli di satu pedagang tetapi setelah relokasi, menjadi pembeli langganan ke pedagang lain.

Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan data yang menyatakan tidak ada perubahan pembeli yang signifikan atau memiliki pengaruh besar bagi pedagang setelah pasar direlokasi. Walaupun ada beberapa pedagang yang merasakan dampak perubahan pelanggan yaitu penurunan pelanggan, dampak ini hanya mengena ke sebagian kecil pedagang yang menurut pandangan peneliti adalah karena faktor tempat atau kios berjualan pedagang-pedagang tersebut terletak di bagian paling belakang Pasar Baru.

Umumnya bagian belakang tersebut adalah bagian kios penggilingan daging dan bumbu yang di tempati beberapa penjual jasa penggilingan tetapi ada sebagian kios yang digunakan pedagang untuk berjualan sayuran.

Mengenai dampak kemacetan, hasil wawancara dan observasi oleh peneliti tidak menunjukkan tingkat kemacetan yang meresahkan karena

di empat titik keluar dan masuknya kendaraan di Pasar Baru telah tersedia dua orang petugas parkir untuk mengatur lalu lintas kendaraan yang keluar dan masuk pasar. Kepadatan kendaraan meningkat dan menjadikan kondisi jalan lebih padat tetapi tidak macet dan dalam batas kelancaran yang normal, hanya pada saat pagi hari yang meliputi jam masuk dimana banyak pengguna kendaraan (pelajar, pekerja, dan orang umum termasuk pembeli yang menuju Pasar Baru) yang melewati jalan dan pada saat sore hari volume kendaraan juga meningkat karena jadwal pulang pekerja dan pelajar.

Dampak sosial selanjutnya adalah mengenai pengelolaan sampah. Sampah pasar pada umumnya memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan sekitar pasar. Volume dan jumlah sampah yang ada di tempat pembuangan sampah pada pasar tradisional sangat besar. Dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti, ada beberapa poin penting yang patut diperhatikan dalam pengelolaan masalah sampah pasar tradisional.

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti dijelaskan bahwa sampah diangkut dua kali dalam sehari untuk selanjutnya dibuang ke pembuangan sampah akhir dan tidak ada tindak lanjut lebih dari pengangkutan sampah tersebut.

Grindle dalam Wahab (2008, h.188) menjelaskan kegiatan-kegiatan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh pihak-pihak yang dipengaruhi kepentingannya, dalam dampak pengelolaan sampah Pasar Baru salah

satu pihak tersebut adalah masyarakat Kanigaran khususnya yang berada dekat dengan Pasar Baru yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan kawasan yang bersih.

Kepentingan masyarakat tersebut bisa menjadi pertimbangan untuk meningkatkan skala prioritas dalam pengelolaan sampah karena dengan pengelolaan sampah yang sebatas mengangkut sampah dua kali dalam sehari tidak cukup karena masih meninggalkan bau tidak sedap dan pemandangan yang tidak menyenangkan karena sampah bercampur-campur tidak ada pemisahan seperti sampah kering dan sampah basah.

b. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi dalam pembahasan ini meliputi dampak relokasi pasar terhadap pendapatan pedagang dan akses ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar Pasar Baru.

Dampak adalah perubahan lingkungan oleh suatu kegiatan (Sudarmo, 1996, h.87). Lingkungan yang dimaksud dalam hal ini bisa berupa lingkungan fisik dan non fisik, lingkungan fisik adalah lingkungan yang meliputi aspek fisik yaitu lahan atau alam sedangkan lingkungan non fisik adalah lingkungan yang tidak bersifat fisik yaitu lingkungan sosial-budaya, ekonomi, dll. sehingga dampak ekonomi dalam pembahasan ini adalah perubahan lingkungan ekonomi yang terjadi oleh suatu kegiatan yaitu relokasi Pasar Baru.

Dari hasil wawancara peneliti umumnya para pedagang tidak mengalami penurunan pendapatan karena minimnya pembeli walaupun

ada sebagian pedagang yang merasakan pendapatannya turun. Para pedagang yang merasa pendapatannya berkurang hanya mencakup sebagian kecil saja sedangkan sebagian besar pedagang di Pasar Baru tidak mengalami penurunan dan cenderung stabil dan bahkan banyak pedagang yang mengaku pendapatan mereka meningkat setelah pasar direlokasi.

Relokasi ke Pasar Baru bagi mayoritas pedagang dapat dianggap sebagai dampak ekonomi yang positif. Peningkatan dan penurunan pendapatan yang dialami pedagang di Pasar Baru disebabkan oleh jumlah pembeli. Tata letak pedagang di Pasar Baru memang sedikit berbeda dengan di Pasar Baru dulu sehingga sehingga berpengaruh terhadap akses pembeli kepada pedagang.

Pedagang yang mendapat kios dan pedagang kaki lima yang dekat area parkir merasakan peningkatan pendapatan karena mudahnya akses pembeli ke pedagang tersebut. Berbeda dengan pedagang yang tempat berjualannya masuk lebih jauh ke dalam pasar, para pedagang ini mengalami penurunan pendapatan karena banyak pembeli yang malas untuk berjalan jauh ke dalam untuk membeli barang di pasar.

Selanjutnya mengenai akses ekonomi masyarakat, hasil wawancara peneliti menunjukkan proses relokasi ke Pasar Baru telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar Pasar. Terbukanya lapangan kerja baru ini yang di sebut sebagai akses ekonomi masyarakat Kanigaran. Banyak warga Kanigaran yang memilih

berusaha atau berdagang di Pasar Baru, ada yang bekerja sebagai juru parkir, pedagang kaki lima, maupun pedagang yang menyewa kios atau bedak.

Sumodiningrat (2011, h.7) menjelaskan bahwa dalam rangka membangun kekuatan ekonomi masyarakat dibutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk memperkuat posisi kemitraan usaha ekonomi masyarakat yang dalam kasus relokasi ke Pasar Baru ini, terbukanya akses ekonomi bagi masyarakat Kanigaran dapat menjadi salah satu upaya dalam mencapai kemandirian ekonomi masyarakat walaupun masih dalam skala usaha kecil.